

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tantangan era perdagangan bebas dan globalisasi yang kian meluas, menuntut sebuah negara untuk terus melakukan suatu terobosan baru demi peningkatan perekonomiannya, maka pembangunan kembali perekonomian nasional yang maju dan mandiri harus terus dikembangkan. Karena itu, diperlukan penggalian sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, yang secara simultan dapat memelihara sumber pertumbuhan ekonomi yang sudah ada. Salah satu sumber yang paling potensial adalah sumber daya maritim, terutama pada sektor kelautan dan perikanan. Hal ini didasarkan pada kecenderungan permintaan baik dari pasar dalam negeri maupun global terhadap komoditas kelautan dan perikanan yang semakin tahun semakin meningkat. Indonesia digadang – gadang mampu memproduksi komoditi kelautan dan perikanan serta jasa – jasa lingkungan yang sangat besar, mulai dari penangkapan di alam maupun budidaya. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, sektor – sektor lain yang terdapat dalam suatu negara, dapat turut maju dan berkembang (Hakim, 2013).

Peran pemerintah dalam mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas kegiatan dari setiap sektor sangat diperlukan demi kemajuan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang sejauh ini cukup berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia (Harianto, 2008). Pembukaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas individu, peningkatan nafkah dan pendapatan hidup, penambahan

devisa melalui kegiatan ekspor dan impor, adalah beberapa diantara peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Kelautan dan perikanan juga menciptakan *multiple effect*, atau efek berantai yang terbukti mampu menggerakkan sektor lain, seperti sektor perdagangan, sektor industri bahkan sektor pendidikan yang terkait dengan berbagai riset – riset penelitian dari perguruan tinggi dan serapan tenaga kerja terdidik. Kelautan dan perikanan selalu diarahkan ke proses industrialisasi berbasis teknologi terbarukan yang akan semakin memacu dan menggerakkan sektor – sektor lain untuk terlibat dalam proses industrialisasi tersebut (Hakim, 2013).

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari kurang lebih 17.500 pulau besar dan pulau kecil yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa, yang memanjang dari Sabang (yang terletak paling ujung barat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam) sampai Merauke (yang terletak pada ujung Provinsi Papua). Negara kepulauan sering pula disebut negara maritim. Wilayah suatu negara maritim meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan laut. Indonesia memiliki luas daratan seluas 1,9 juta Km², dan luas wilayah perairan seluas 3,1 juta Km². Sementara garis pantai yang dimiliki Indonesia adalah sepanjang kurang lebih 81.000 km dengan potensi perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas, kualitas maupun diversitas. Potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia. Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, dan sudah dimanfaatkan sebesar 4,7 juta ton pada

tahun 2004 atau 91.8% dari JTB (Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia).

Produksi perikanan tahun 2008 yang berasal dari kegiatan penangkapan dan budidaya mencapai 9,05 juta ton. Dari total produksi tersebut perikanan budidaya menyumbang 47,49%. Laju pertumbuhan produksi perikanan nasional sejak tahun 2005 – 2009 mencapai 10,02% per tahun, dimana pertumbuhan budidaya sebesar 21,93%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan perikanan tangkap yang hanya sebesar 2,95%. Sedangkan nilai produksi perikanan meningkat 15,61% dari Rp57,62 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp102,78 triliun pada tahun 2009. Jawa Timur merupakan salah satu pusat industrialisasi kelautan dan perikanan di Indonesia. Kontribusi sektor perikanan dari Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 25 persen dari kebutuhan perikanan nasional, yaitu sebanyak 285 ribu ton dengan nilai 750 juta *dollar* (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur).

Semakin tahun jumlah produksi perikanan di Provinsi Jawa Timus kian meningkat, hal itu tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Hasil Produksi Perikanan menurut Kabupaten / Kota di Jawa Timur

No.	Kabupaten / Kota	Hasil Produksi Perikanan (Ton)		
		2013	2014	2015
1	Tuban	11.508,4	11.779,8	30.253,0
2	Lamongan	73.183,0	75.568,9	46.605,0
3	Gresik	18.818,8	17.723,1	105.619,7
4	Kota Surabaya	7.714,3	8.079,0	7.237,9
5	Bangkalan	24.837,1	25.140,5	3.807,0
6	Sampang	9.325,5	9.869,1	7.284,9
7	Pamekasan	20.288,4	22.522,0	1.491,0
8	Sumenep	45.789,7	47.156,9	600.792,5
9	Sidoarjo	15.043,4	11.384,5	94.320,6
10	Pasuruan	7.807,3	8.105,0	15.261,2
11	Kota Pasuruan	1.808,9	1.473,3	1.433,7
12	Probolinggo	9.755,7	13.155,6	8.084,1
13	Kota Probolinggo	13.050,5	18.659,9	447,3
14	Situbondo	7.870,8	8.945,7	6.802,1
15	Pacitan	8.322,6	8.419,0	814,4
16	Trenggalek	36.568,1	18.550,3	3.866,4
17	Tulungagung	4.525,2	2.908,9	35.014,4
18	Blitar	1.797,5	1.346,2	14.641,6
19	Malang	10.949,3	11.077,5	20.476,9
20	Lumajang	4.677,5	4.853,2	2.923,9
21	Jember	7.711,3	8.945,7	9.142,9
22	Banyuwangi	49.663,1	60.602,5	25.107,8
23	Magetan	36,4	36,7	1.244,2
24	Ponorogo	78,4	55,9	1.670,8
25	Ngawi	465,7	509,7	2.349,6
26	Bojonegoro	1.218,1	1.171,4	3.315,7
27	Nganjuk	667,0	330,0	8.535,0
28	Madiun	339,6	492,1	2.611,1
29	Kota Madiun	40,4	66,3	147,8
30	Jombang	197,0	184,0	15.584,6
31	Kediri	162,5	153,8	14.454,7
32	Kota Kediri	51,5	39,2	150,4
33	Mojokerto	137,4	136,3	340,7
34	Kota Mojokerto	3,7	3,7	195,9
35	Kota Malang	-	-	58,3
36	Kota Blitar	-	-	179,0
37	Bondowoso	624,1	517,7	796,6
38	Kota Batu	-	-	59,1
	Jumlah	395.046,8	399.372,2	1.093.121,5

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel yang menampilkan hasil produksi perikanan menurut kabupaten / kota di Jawa Timur, menunjukkan bahwa secara jumlah, produksi perikanan di Provinsi Jawa Timur meningkat setiap tahunnya dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Akan tetapi jika melihat perkembangan di setiap kabupaten / kota, tidak semua mengalami peningkatan. Seperti Kabupaten Bangkalan misalnya yang mengalami peningkatan jumlah produksi perikanan pada tahun 2014, namun di tahun 2015 jumlah produksi perikanan di Kabupaten Bangkalan justru menurun sangat drastis. Sedangkan untuk Kabupaten Gresik yang mengalami penurunan jumlah hasil produksi perikanan pada tahun 2014, justru mengalami peningkatan jumlah hasil produksi perikanan yang sangat drastis di tahun 2015.

Peningkatan jumlah hasil produksi perikanan di setiap tahunnya ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah nelayan. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa jumlah nelayan di Jawa Timur cenderung tidak stabil. Berikut adalah tabel yang menunjukkan banyaknya jumlah nelayan dari masing – masing kabupaten di Jawa Timur :

Tabel 1.2

Jumlah Nelayan menurut Kabupaten / Kota di Jawa Timur

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Nelayan (Orang)		
		2013	2014	2015
1	Tuban	20.288	19.092	20.878
2	Lamongan	35.040	35.040	18.682
3	Gresik	10.286	9.817	10.703
4	Kota Surabaya	2.804	7.771	2.049
5	Bangkalan	6.222	6.222	5.372
6	Sampang	12.602	12.33	27.634
7	Pamekasan	14.700	14.608	12.699
8	Sumenep	41.439	40.228	42.725
9	Sidoarjo	2.192	1.692	2.377
10	Pasuruan	7.212	7.104	11.052
11	Kota Pasuruan	1.453	1.936	1.453
12	Probolinggo	12.109	11.779	11.022
13	Kota Probolinggo	2.812	2.581	5.000
14	Situbondo	11.566	11.566	8.875
15	Pacitan	6.093	4.605	3.311
16	Trenggalek	9.804	10.056	8.637
17	Tulungagung	2.414	5.497	9.010
18	Blitar	1.796	1.195	5.661
19	Malang	5.615	4.395	3.923
20	Lumajang	1.297	1.333	1.252
21	Jember	19.221	19.221	13.393
22	Banyuwangi	27.880	32.13	17.092
23	Magetan	209	215	99
24	Ponorogo	202	58	164
25	Ngawi	3.050	560	3.319
26	Bojonegoro	1.170	1.146	1.942
27	Nganjuk	1.530	479	3.238
28	Madiun	493	859	476
29	Kota Madiun	325	422	39
30	Jombang	751	-	913
31	Kediri	271	189	250
32	Kota Kediri	182	287	66
33	Mojokerto	380	380	767
34	Kota Mojokerto	8	-	16
35	Kota Malang	-	-	-
36	Kota Blitar	-	-	-
37	Bondowoso	2.291	1.874	1.170
38	Kota Batu	-	-	-
	Jumlah	265.707	266.667	259.259

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

Berbeda dengan jumlah produksi perikanan yang terus meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2015, jumlah nelayan di Provinsi Jawa Timur justru menurun di tahun 2015. Peningkatan terjadi di tahun 2014 yang sebelumnya jumlah nelayan Provinsi Jawa Timur sebanyak 265,707 orang meningkat menjadi 266.667 orang. Akan tetapi pada tahun 2015 jumlah nelayan Provinsi Jawa Timur menurun menjadi 259.259 orang. Disamping itu, penurunan jumlah nelayan ini tidak mempengaruhi jumlah produksi perikanan di Jawa Timur. Terbukti dari dua data di atas yang menunjukkan penurunan jumlah nelayan tidak diikuti dengan penurunan jumlah produksi perikanan di Provinsi Jawa Timur.

Pembangunan terus dilakukan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Di Provinsi Jawa Timur pembangunan dilakukan berdasarkan dari isu – isu strategi yang muncul, yaitu :

1. Pembangunan Kawasan Jawa Timur Bagian Utara, dengan tujuan untuk mendukung penguatan pusat pertumbuhan di Pulau Jawa sesuai dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dan diarahkan untuk mendukung pembangunan wilayah Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan yang menjadi orientasi, pasar dan rujukan pembangunan wilayah Indonesia Timur.
2. Pembangunan Kawasan Jawa Timur Bagian Selatan, dengan tujuan untuk mendukung pembangunan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Timur bagian selatan.
3. Percepatan Pembangunan Wilayah Suramadu, dengan tujuan untuk mendukung pengembangan wilayah suramadu sebagai pusat pengembangan perekonomian Jawa Timur.

Berdasarkan isu strategis di atas, perluasan pusat pertumbuhan Jawa Timur dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pusat pertumbuhan bagian barat, pusat pertumbuhan bagian tengah dan pusat pertumbuhan bagian timur. Wilayah suramadu sebagai pusat pengembangan perekonomian Jawa Timur berada pada perluasan pertumbuhan wilayah bagian timur. Wilayah suramadu terdiri dari Kota Surabaya sebagai Wilayah Suramadu sisi Surabaya, dan Kabupaten Bangkalan sebagai Wilayah Suramadu sisi Madura, mengingat wilayah suramadu merupakan penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Madura.

Perluasan pertumbuhan Madura difokuskan pada pertumbuhan berbasis agribisnis dan minabisnis. Minabisnis merupakan suatu kegiatan penanganan komoditas secara komprehensif mulai dari hulu sampai hilir (pengadaan dan penyaluran sumber daya, proses produksi, pengolahan dan pemasaran).

Pulau Madura dengan segala kekayaan alam yang dimiliki, membentuk masyarakat dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, terutama pada masyarakat pesisir yang mengelilingi Pulau Madura. Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten di Pulau Madura yang letaknya paling berdekatan dengan Pulau Jawa. Bagian selatan dari Kabupaten Bangkalan berbatasan langsung dengan Selat Jawa yang memisahkan antara Pulau Madura dan Pulau Jawa, sedangkan bagian utara Kabupaten Bangkalan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Jumlah unit pengolahan ikan dari Kabupaten Bangkalan pada tahun 2016 adalah sebanyak 679 unit dan merupakan yang terbanyak di Pulau Madura. Volume dan nilai jual produk hasil olahan perikanan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2016 sebanyak 980.933 Kg, dengan nilai jual sebesar Rp 27.435.249.583,00 (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur).

Memiliki potensi alam yang melimpah di Kabupaten Bangkalan menggambarkan bahwa Kabupaten Bangkalan memberikan kontribusi yang baik dari sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi. Salah satu desa yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang baik adalah Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan. Desa yang letaknya bersebelahan langsung dengan Laut Jawa ini memiliki peluang untuk menjadi wilayah pesisir dengan penghasil sumber daya kelautan perikanan yang besar. Jumlah nelayan di Desa Sepulu kurang lebih sebanyak dua ratus nelayan yang mampu mendapatkan hasil tangkapan sebanyak seratus ekor sehari. Akan tetapi di Desa Sepulu belum ada sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menunjang peningkatan potensi yang dimiliki seperti Tempat Penampungan Ikan (TPI) misalnya. Sehingga para nelayan kesulitan untuk menampung hasil tangkapannya sebelum dijual pada konsumen. Permasalahan tersebut yang merupakan bentuk dari *unsustainable development* sebaiknya segera di atasi agar memberikan kemudahan kepada para nelayan. Di samping itu, Desa Sepulu merupakan desa yang memiliki jumlah rumah tangga yang berada di sektor ekonomi industri, perdagangan, angkutan dan jasa terbanyak di Kecamatan Sepulu. Hal itu dibuktikan dengan kepemilikan tiga produk unggulan dari olahan ikan yaitu abon ikan, terasi ikan dan petis ikan (Kecamatan Sepulu Dalam Angka Tahun 2016).

Tabel 1.3
Produk Unggulan Kecamatan Sepulu Tahun 2015

No.	Produk Unggulan	Lokasi
1	Abon Tongkol	Desa Sepulu
2	Air Legen	Desa Maneron
3	Terasi Ikan	Desa Sepulu
4	Petis Ikan	Desa Sepulu

Sumber : Kecamatan Sepulu Dalam Angka Tahun 2016

Desa Sepulu memiliki produk olahan lebih banyak dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Sepulu. Akan tetapi belum ada penelitian yang menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi di Desa Sepulu tersebut telah berbasis pada konsep *bule economy* atau belum. Mengingat untuk menjaga keberlangsungan habitat alam yang kita miliki, harus didukung dengan pemanfaatan alam yang baik dan menjaga lingkungan.

Sektor kelautan dan perikanan sebagai kegiatan ekonomi memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu kegiatan ekonomi, kelautan dan perikanan seharusnya terus dimajukan dan dikembangkan serta menjadi prioritas agar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Hal ini menuntut adanya inovasi dan kreativitas serta optimalisasi peran stakeholder, dalam hal ini pemerintah, agar kegiatan di sektor kelautan dan perikanan tetap diminati dan bisa berkontribusi untuk kesejahteraan suatu wilayah. Selain itu kelautan dan perikanan yang saat ini mengarah ke proses industrialisasi harus mampu menjaga keberlanjutan usaha dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian perairan (Rani, 2015).

Tantangan pembangunan yang semakin kompleks merupakan akibat dari kompetisi ekonomi global, serta perubahan iklim dan kependudukan yang menuntut perlunya kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah konsep *Blue Economy*. Konsep *blue economy* di Indonesia digagas oleh Cicip Sutardjo selaku menteri kelautan dan perikanan. *Blue economy* adalah proses dimana bahan baku berikut proses produksi berasal dari alam semesta dan mengikuti cara alam bekerja.

Blue economy atau ekonomi biru merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang dewasa ini menjadi kurang baik dan menciptakan lebih banyak kegiatan dalam bentuk model yang *sustainable*. Konsep *blue economy* dikembangkan untuk menjawab tantangan sistem ekonomi dunia yang cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi melebihi kapasitas atau daya dukung alam, serta tidak menghiraukan kondisi lingkungan di masa yang akan datang.

Maksud dari *blue economy* adalah salah satu bentuk *sustainable development* yang merupakan koreksi sekaligus kekayaan dari *green economy* dengan semboyan “*Blue Sky – Blue Ocean*”, dimana ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, namun langit dan laut tetap biru. Konsep *blue economy* menjadi satu hal yang akan mendukung jalannya konsep *green economy* yang selama ini menjadi konsep dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. *Green economy* awalnya telah mampu mendorong sistem investasi *low carbon*, efisiensi dan optimalisasi, bersih, meminimalkan limbah dan meningkatkan kegiatan ekosistem. Akan tetapi walaupun prinsip – prinsip tersebut mulai dikembangkan, namun masih belum mampu mengatasi

keselekahan manusia untuk mengeksploitasi alam lebih banyak. Bahkan, implementasi pembangunan berkelanjutan dengan konsep *green products and services*, yaitu produk – produk dan jasa ramah lingkungan harus dibeli mahal dan makin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin (Ilma, 2014). Sehingga diperlukan perhatian khusus agar konsep *blue economy* ini benar – benar dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kualitas hidup manusia khususnya masyarakat di pesisir pantai agar tingkat kesejahteraannya meningkat.

Pengertian *blue economy* dalam kalimat sederhana dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat alam dan berkeadilan sosial. *Blue economy* merupakan konsep optimalisasi khususnya perairan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan. Konsep *blue economy* mengedepankan dan menitikberatkan pada efisiensi. Efisiensi mendorong adanya pengembangan investasi dan bisnis kelautan dan perikanan dengan tetap menjaga lingkungan agar tetap lestari. Inti utama dari *blue economy* ini adalah kegiatan yang pro ekosistem. Segala limbah keluaran dari kegiatan ekonomi khususnya di wilayah pesisir harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan, tanah maupun perairan umum, atau dengan kata lain *zero – waste*. Limbah, baik limbah kimia maupun limbah organik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada habitat dan kehidupan ekosistem (Saksono, 2013).

Sampai saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang pengaplikasian konsep *blue economy* di Indonesia, hanya saja setidaknya terdapat 23 UU sektoral yang berkaitan dengan bidang kelautan. Selain itu, sampai saat ini juga belum ada peraturan yang dijadikan landasan untuk membuat Tata Ruang Laut Nasional. Saat ini yang ada hanya tata ruang laut hingga 12 mil sebagai mana yang tertera dalam UU no. 27 tahun 2007 tentang 'Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil' yang kemudian disempurnakan dengan UU no. 1 tahun 2014 tentang 'Perubahan Atas Undang – Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil'.

Undang – undang kelautan memiliki fokus untuk *mainstreaming* dan percepatan pembangunan kelautan nasional ke depan, *breakthrough* terhadap permasalahan peraturan perundangan yang ada, *outward looking* terhadap kepentingan kelautan bagi bangsa Indonesia ke depan, menetapkan yang belum diatur dalam UU yang sudah ada di bidang kelautan dan mengacu pada kondisi geografis Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *blue economy* yang intinya untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam yang kita miliki.

Oleh karena belum adanya regulasi yang baku mengenai pengaplikasian konsep *blue economy*, maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang setidaknya telah berbasis konsep *blue economy* di wilayah pesisir Pulau Madura yaitu Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan. Mengingat wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang baik, maka langkah lebih baiknya apabila potensi yang dimiliki diolah dengan baik dan berbasis konsep *blue economy*, sehingga tidak merusak lingkungan dan terjaga keberadaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi di sector dan non sektor kelautan dan perikanan yang berbasis pada konsep *blue economy* di Desa Sepulu, Kabupaten Bangkalan.
2. Memaknai proses kegiatan ekonomi di sektor dan non sektor kelautan dan perikanan di Desa Sepulu, Kabupaten Bangkalan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengidentifikasi apakah kegiatan ekonomi di sektor dan non sektor kelautan dan perikanan telah berbasis pada konsep *blue economy* atau tidak.
2. Memaknai latar belakang dari proses kegiatan ekonomi di sektor dan non sektor kelautan dan perikanan yang ada di Desa Sepulu, Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat mengetahui apakah kegiatan ekonomi yang ada di sektor kelautan dan perikanan maupun di sektor non kelautan dan perikanan telah berbasis pada konsep *blue economy*

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis konsep *blue economy* di waktu yang akan datang.